



Buletin

Parlementaria

Nomor 1009/V/V/2018 • Mei 2018

DPR Setujui RUU Antiterorisme



9 772614 339005

Komisi VI DPR Pastikan Stabilitas Harga Beras

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i menyerahkan laporan pembahasan RUU Antiterorisme kepada Pimpinan DPR RI

DPR Setujui RUU Antiterorisme

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) disetujui menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI.



Foto: jaka/hr

dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

Persetujuan RUU menjadi UU ini berarti menepati harapan Pimpinan DPR yang ingin selesai di akhir Mei 2018. Revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sudah menjadi kebutuhan zaman dan desakan publik bahwa banyak yang perlu diubah dari muatan UU lama.

“Ada perubahan signifikan terhadap sistematika UU Nomor 15 Tahun 2003, menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan, dan kemudian soal peran TNI yang itu semua baru dari undang-undang sebelumnya,” jelas Romo, sapaan akrab Muhammad Syafi’i dalam laporannya.

Ditambahkan Romo, penangkapan dan penahanan tersangka teroris tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Para terduga teroris harus diperlakukan manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. Prinsip ini penting dikemukakan agar penegakan HAM sesuai prinsip universal yang selama ini berlaku.

Selain itu, yang juga baru dalam UU ini adalah perlindungan korban. Semula dalam UU lama hanya memuat kompensasi dan restitusi. “Kini RUU telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi, dan pemberian kompensasi,” papar Romo lebih lanjut.

Pasal-pasal pencegahan terorisme juga terus diperkaya. Setidaknya ada empat pasal yang mengatur hal ini (Pasal 43A, 43B, 43C, dan 43D), terutama menyangkut kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Di akhir laporannya, Romo berharap, UU ini bisa menjadi payung hukum dan melindungi seluruh anak bangsa dari bahaya terorisme. ■ mh/sc

Banyak subansubansi pengatur yang dimuat dalam UU baru di bidang penindakan terorisme ini. Tidak hanya bicara pemberantasan, UU ini juga bicara aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan, dan pengawasan.

Demikian disampaikan Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi’i dalam pidato laporannya di hadapan Rapat Paripurna yang



- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
WAKIL KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)
- PIMPINAN PELAKSANA**
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
- WK. PIMPINAN REDAKSI**
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
- REDAKTUR**
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi
- SEKRETARIS REDAKSI**
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
- ANGGOTA REDAKSI**
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
Ria Nur Mega, Taufan Syahrullli
- REDAKTUR FOTO**
Eka Hindra, Iwan Armanias
- FOTOGRAFER**
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,
Azka Restu Fadilah
- ADMINISTRASI**
Luthfi Suci Nur ‘Aini, Damar Maulana Taher, Geraldie Opie
- ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

- PIMPINAN PENERBITAN**
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)
- PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
- PHOTOGRAFER ART**
Friederick Munchen
- DESAIN GRAFIS**
Dito Sugito
- STAF PRODUKSI**
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,
- PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**
Eko Priyanto, S.E (Kasubag Distribusi)
- KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna
- ADMINISTRASI**
Sjaefudin, S.Sos
- STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Arif Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Sidang Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 - 2018

Foto: Jaka/hr

Ketua DPR Minta Pemerintah Satu Suara Dalam Pembahasan RUU Antiterorisme

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk bersikap satu suara dalam pembahasan RUU Antiterorisme. Hal tersebut menjadi salah satu isi dari pidato sambutannya dalam Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 - 2018.

“DPR bersama pemerintah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk mempercepat penyelesaian perubahan RUU Antiterorisme guna memberikan payung dan kepastian hukum dalam pemberantasan terorisme, yang menjadi musuh bagi kita semua. Kami juga meminta sekali lagi kepada pemerintah agar bersikap satu suara dalam pembahasan RUU tersebut,” ujar Bamsuet begitu ia biasa disapa wartawan.

Atas nama DPR, Bamsuet juga memberikan apresiasi dan dukungan kepada pihak Kepolisian yang telah bertindak sigap di lapangan, termasuk menangkap jaringan terorisme di Surabaya, Sidoarjo, dan beberapa daerah lainnya. Selanjutnya, ia meminta agar penjagaan di tempat ibadah, objek

vital negara, dan sarana publik lainnya ditingkatkan serta dilakukan secara berkelanjutan, khususnya di bulan Ramadhan dan Idul Fitri ini.

“Kepada masyarakat, saya menghimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi dan tidak ikut menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat juga diminta aktif berpartisipasi melaporkan kepada aparat keamanan, jika mengetahui ada kegiatan atau ada orang yang mencurigakan di lingkungannya masing-masing,” tambahnya.

Tidak hanya itu, terkait pengamanan narapidana teroris, ia juga mendesak Kementerian Hukum dan HAM dan Pimpinan Polri melakukan evaluasi sistem pengamanan narapidana teroris sehingga

tidak terulang kembali peristiwa di Mako Brimob Kelapa Dua beberapa hari yang lalu.

“Kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), saya minta meningkatkan upaya pencegahan dan antisipasi terhadap segala bentuk aksi terorisme serta pembinaan atau deradikalisasi bagi pelaku yang sudah tertangkap beserta seluruh keluarganya,” tegas Bamsuet.

Pada kesempatan itu, atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPR RI, politisi dari Fraksi Partai Golkar ini kembali mengungkapkan rasa dukanya yang mendalam atas peristiwa di Rutan Cabang Salemba di Mako Brimob Kelapa Dua, serta serangkaian aksi terorisme di Surabaya dan Riau. Ia juga mengutuk keras tindakan biadab yang tidak berperikemanusiaan tersebut. Sekaligus meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas serta menumpas jaringan terorisme sampai ke akar-akarnya. ■ ayu/sc

Baru-baru ini beredar video berdurasi satu menit dua detik berisi konvoi kendaraan yang membawa bendera Israel menyebar secara viral. Peristiwa itu diketahui terjadi di Jayapura, Papua.

Fadli Zon Dorong Aparat Hentikan Pengibaran Bendera Israel di Papua

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan agar aparat penegak hukum setempat segera menghentikan aktifitas pengibaran Bendera Israel yang dilakukan sejumlah masyarakat di Papua itu. Fadli mengatakan sebaiknya aksi pengibaran bendera Israel tidak terjadi lagi. Sebab, aksi itu akan menimbulkan kesalahpahaman.

“Baiknya itu dihentikan. Karena itu jelas dari Negara Israel yang bukan bendera dari tradisi, melainkan bendera dari zionis Israel,” papar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5).

Fadli juga menegaskan agar Kepolisian atau aparat penegak hukum setempat bisa menjelaskan peristiwa pengibaran bendera Israel di Jayapura, Papua. Menurutnya keterangan dari Polisi itu penting agar tidak menimbulkan interpretasi macam-macam.

“Saya melihat bahwa ini bisa memberikan satu intepretasi berbeda ya. Dan harus ada penjelasan dari pihak Kepolisian terkait pengibaran bendera Israel di Papua,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.

Dia juga mengungkapkan, bahwa aspirasi mayoritas masyarakat di



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Foto: Rumi/hr

Fadli juga menegaskan agar Kepolisian atau aparat penegak hukum setempat bisa menjelaskan peristiwa pengibaran bendera Israel di Jayapura, Papua. Menurutnya keterangan dari Polisi itu penting agar tidak menimbulkan interpretasi macam-macam.

Indonesia menolak Israel serta menolak pemindahan Kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv, kemudian ada peristiwa pengibaran bendera seperti itu bisa memicu persepsi dan reaksi negatif.

Fadli juga mengingatkan, pernah ada kejadian di Papua penghalangan pengibaran bendera yang identik dengan Islam. Maka jika pengibaran bendera bintang Daud dibiarkan, akan menimbulkan asumsi diskriminasi.

Pengibaran bendera bintang Daud

di bumi Cendrawasih itu ternyata bukan kali pertama. Video serupa konvoi dan pertemuan umum dengan aneka atribut bintang Daud di Papua nyatanya cukup banyak ditemukan dalam situs berbagi video, Youtube.

Menurut berbagai sumber kegiatan itu untuk memperingati satu dasawarsa Sion Kids Centre dalam Visi Misinya bagi Israel. Sion Kids Center pada pokoknya ialah gerakan untuk mengembalikan Alkitab ke akar-akar Yahudi. ■eko/sf



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Foto: Andri/hr

Pemerintah Harus Sampaikan Kepada Dunia Bahwa Indonesia Aman

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, banyak negara yang mengeluarkan *travel advice* atau anjuran bepergian kepada warganya yang mengunjungi Indonesia, merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Hal ini akibat dari situasi dan kondisi Indonesia, yang sempat mendapat serangan teror baru-baru ini.

“ Kita tidak bisa mengingkari, beberapa negara mengeluarkan *travel advice* terhadap Indonesia.

Tentunya ini menjadi salah satu konsekuensi yang tidak bisa dihindari,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

Menurutnya, dengan adanya situasi ini, pemerintah dapat memaksimalkan peran Kementerian Pariwisata.

Kemepar harus mengambil perannya, dengan memberikan suatu pemahaman kepada dunia bahwa Indonesia dalam situasi dan kondisi aman. Hal ini seperti saat terjadinya bom Bali belasan tahun lalu, yang berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan.

“Kemepar jangan diam saja. Artinya hal ini seperti dulu saat terjadi bom Bali dulu. Waktu itu Kemepar memberikan pemahaman bahwa Indonesia aman.

Sekarang harus dilakukan minimal yang sama. Jangan dibiarkan. Jangan seolah ada pembenaran bahwa tidak terjadi apa-apa. Ini realitanya negara-negara mengeluarkan *travel advice*,” tandas politisi PAN itu.

Sejauh ini, sudah ada 14 negara yang mengeluarkan *travel advice* atau peringatan keamanan untuk warganya yang akan berkunjung ke Indonesia. *Travel advice* itu dirilis setelah serangan teror yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air.

Daftar negara yang mengeluarkan *travel advice* itu diantaranya Inggris, Amerika Serikat, Australia, Hongkong, New Zealand, Singapura, Malaysia, Polandia, Irlandia, Kanada, Prancis, Filipina, Brasil, dan Swiss. ■sf

RUU Antiterorisme Ditargetkan Selesai Akhir Bulan Mei

Aksi terorisme telah terjadi di beberapa daerah. Bahkan teror bom di tiga Gereja Surabaya, Mapolresta Surabaya dan rusunawa di Sidoarjo, serta teror yang terjadi di Mapolda Riau, telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa, bukan hanya masyarakat, namun juga dari aparat Kepolisian.

Beberapa tragedi itu memunculkan desakan publik kepada DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan RUU Antiterorisme ditargetkan akan selesai akhir bulan Mei ini.

“Kalau sudah sepakat di antara pemerintah dengan DPR, tinggal ketuk palu. Secara administrasi dan urutan rapat pansus sudah dipersiapkan. Lalu selanjutnya tinggal tim sinkronisasi akan melakukan proses lebih lanjut. Jika diberikan target paling longgar akhir bulan ini, akan kita capai RUU Antiterorisme tersebut,” jelas Agus di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5) petang.

Dia menjelaskan dalam pembicaraan-pembicaraan non formal antara para pemangku kepentingan, DPR dengan pemerintah sudah menemukan kata sepakat terkait RUU Antiterorisme. “Bahkan Pansus RUU Antiterorisme akan

meningkatkan pekerjaannya di minggu ini, sehingga pertemuan dari awal sampai akhir minggu ini, diharapkan bisa memberikan hasil yang nyata,” yakin Agus.

Agus mengungkapkan yang membuat RUU ini tertunda karena antara DPR dan pemerintah sedang mencari formula yang tepat tentang frasa dan definisi dari terorisme. Akhirnya disepakati bahwa definisi terorisme dalam RUU ini diperkaya dengan penambahan frasa.

Pada RUU Antiterorisme, definisi terorisme adalah, segala bentuk perbuatan yang dengan sengaja melakukan kekerasan yang menimbulkan rasa takut pada fasilitas publik baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Frasa terorisme yang menjadi hal yang dibicarakan, yang tadinya sebenarnya tidak ada masalah, namun memang pemerintah saat itu meminta kepada DPR untuk menunda, karena memang frasa terorisme itu, yang akan diseragamkan di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri,” jelas Agus.

■ eko/sf

nusantara III



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Foto: Andri/hr



Pelantikan Ir. Indra Iskandar, M.Si., sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo

Ketua DPR Lantik Sekjen DPR RI

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melantik Ir. Indra Iskandar, M.Si., sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI menggantikan Damayanti yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Sekretaris Jenderal DPR RI, di Pustakaloka Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5). Pelantikan Indra Iskandar sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 49/TPA Tahun 2018.

Dalam sambutannya, Bambang Soesatyo (Bamsot) menyampaikan bahwa terpilihnya Indra Iskandar sudah berdasarkan proses seleksi terbuka yang dilakukan oleh Pansel. “Saya dan kita semua mengapresiasi proses seleksi yang cukup ketat tersebut hingga pada akhirnya presiden memilih nama Indra Iskandar. Semua proses tersebut sudah berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Bamsot.

Bamsot juga menjelaskan bahwa keberadaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur *supporting system* memiliki posisi yang strategis di tengah meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja DPR RI. Selain itu Sekretariat Jenderal DPR RI juga dituntut untuk lebih responsif terhadap berbagai kehendak rakyat tersebut.

“Berbagai upaya akan terus dilaksanakan dewan untuk meningkatkan fungsi keterwakilan DPR RI dalam melaksanakan ketiga fungsinya, termasuk didalamnya dalam hal menyuarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Bamsot berharap, Indra Iskandar sebagai Sekjen DPR yang baru dapat terus menjaga kualitas dukungan layanan persidangan kepada DPR RI dan perlunya sinergitas yang prima antara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam memaksimalkan dukungan keahlian, teknis, dan administrasi kepada dewan.

Dalam memasuki tahun politik, ia berpesan agar Sekretariat Jenderal DPR RI yang merupakan unsur *supporting system* DPR RI dan juga aparatur sipil dapat terus mengedepankan asas netralitas, akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, serta persatuan dan kesatuan.

“Saya mengingatkan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang baru untuk fokus bekerja dalam rangka mendukung kinerja dewan dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari Damayanti yang telah menjadi pelaksana tugas Sekjen selama hampir 8 bulan. Semoga Sekretariat Jenderal dapat semakin profesional sebagai unsur pendukung DPR RI,” harap Bamsot. ■ skr/sc



Foto: Jaka/hr

Dalam Kondisi Emergency Koopsusgab Memang Diperlukan

Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan menilai dalam kondisi *Emergency* (darurat-red) Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI memang diperlukan. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum berlangsungnya sidang paripurna pembukaan masa persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 di Senayan, Jakarta, Jumat (18/5).



Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan

“Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia menurut saya sudah sesuai undang-undang, karena tugas TNI selain perang adalah pemberantasan terorisme. Oleh karena itu pemberantasan terorisme di setiap angkatan ada. Dan secara eksplisit disebutkan salah satu dari 10 tugas TNI selain perang yang itu, pemberantasan terorisme,” ungkap

Sjarifuddin.

Diakui politisi dari Fraksi Partai Demokrat bahwa dalam penanganan terorisme, Indonesia sudah punya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). BNPT merupakan lembaga yang paling bisa diandalkan untuk itu. Di sana juga akan mewedahi TNI.

Namun dalam kondisi *emergency* alias darurat,

Foto: Rumi/hr

Negara Harus Memfasilitasi Hak Konstitusi Warga Indonesia

Hak pilih masyarakat adalah hak konstitusi sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Untuk itu DPR meminta pemerintah melakukan langkah optimal untuk memperjuangkan 161,24 ribu masyarakat yang belum memiliki e-KTP sebagai salah satu persyaratan melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018.

menutup mata, masih banyak yang belum memiliki e-KTP. Bahkan di Karawang yang dekat dengan Jakarta saja masih ada sekitar 8 ribu yang belum memiliki e-KTP.

“Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum dan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi penyelesaian data pemilih dan meminta Badan Pengawas Pemilu agar melakukan pengawasan yang cermat terhadap data pemilih Pilkada. Terlebih data yang akan digunakan pada tahun 2018 ini, 80 persen akan digunakan

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Mardhani Ali Sera di sela-sela RDP dengan Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar yang membahas Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Sementara (DPT dan DPS) Pilkada 2018.

“Kami melihat memang semua sudah bekerja walalupun masih ada beberapa catatan. Di daerah Papua misalnya kami melihat kepemilikan e-KTP diangka 30 persen, padahal penyelenggaraan Pilkada tinggal satu bulan dan penyelenggaraan Pilpres kurang dari setengah tahun. Ini yang kita minta perlu ada solusi,” ungkap Mardhani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

Pihaknya menyadari bahwa undang-undang telah mengatur bahwa peserta yang bisa memilih adalah yang memiliki e-KTP, namun pihaknya juga tidak bisa



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardhani Ali Sera

Foto: Enno/hr

Jemput bola untuk melakukan perekaman e-KTP terus dioptimalkan. Pihaknya tidak bisa sembarangan mengeluarkan surat keterangan (suket) bagi masyarakat yang ingin melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 namun belum melakukan perekaman.

dimana pemerintah harus tanggap dalam menangani terorisme, maka hal yang menjadi prioritas dan yang harus paling diperhatikan adalah penanganan terorisme. Sehingga, Sjarifuddin menilai pembentukan Koopsusgab dinilai sebagai langkah yang tepat.

“Mungkin *emergency* sebelum UU Anti Terorisme disahkan, bisa saja. Karena pemerintah harus tanggap dalam menangani terorisme. Penanganan terorisme merupakan hal yang paling prioritas yang harus diperhatikan. Kalau ada langkah presiden seperti itu ya boleh-boleh saja dan memang demikian seharusnya. Tetapi begitu UU Anti Terorisme diketok palu (disahkan-red), maka sudah tidak perlu lagi badan itu (Koopsusgab), dan penanganan terorisme ada pada BNPT, yang didalamnya juga mewadahi TNI,” paparnya. ■ **ayu/sc**

lagi dalam Pemilihan Umum 2019,” jelasnya.

Politisi F-PKS itu juga menyampaikan pihaknya meminta kepada Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk terus menjemput bola hingga ke kabupaten. “Kami minta Dirjen Dukcapil segera mengambil langkah-langkah yang dapat mengoptimalkan perekaman KTP elektronik agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, memaparkan ada 161,24 ribu masyarakat yang belum memiliki e-KTP, namun untuk terus mengurangi jumlah masyarakat yang belum memiliki e-KTP tersebut, pihaknya terus melakukan jemput bola hingga ke desa. “Kami terus melakukan jemput bola, agar masyarakat bisa melakukan perekaman,” jelasnya.

Jemput bola untuk melakukan perekaman e-KTP terus dioptimalkan. Pihaknya tidak bisa sembarangan mengeluarkan surat keterangan (suket) bagi masyarakat yang ingin melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 namun belum melakukan perekaman.

“Jadi, kalau masyarakat sudah melakukan perekaman kami bisa mengeluarkan suket, tetapi kalau belum kami tidak bisa mengeluarkan suket, kami tidak mau ada double,” ungkapnya, seraya menghimbau seluruh masyarakat yang belum memiliki e-KTP untuk aktif mendatangi Dukcapil terdekat. ■ **rnm/sc**

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Dampak Pembentukan Koopsusgab

Pemerintah harus bijak dan memikirkan dampak dari pembentukan Korp Operasi Khusus Gabungan TNI (Koopsusgab) untuk menangani kasus-kasus teror akhir-akhir ini. Pemerintah tidak perlu terlalu panik dengan keadaan ini. Pasalnya, Indonesia sudah memiliki Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dengan Densus 88 Anti Teror, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Menurut saya, mereka mampu menangani ini. Jadi jangan memperkeruh suasana dengan membentuk tim-tim lain di luar yang sudah ada. Maksimalkan badan tersebut untuk tangani kasus-kasus teror yang marak ini,” kata Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang jelang pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5).

Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan, pemerintah perlu segera memanggil institusi yang terkait dengan penanggulangan terorisme tersebut. “Panggil BIN, Polri dan BNPT untuk selesaikan masalah ini. Jangan bentuk tim-tim baru yang akhirnya membuat tumpang tindih, komando yang saling silang,” ia mengingatkan.

Menurut mantan pengacara ini, untuk mencegah aksi-aksi terorisme terulang kembali, pemerintah bisa bekerja sama dengan DPR dalam menyusun dan membahas agar RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) bisa segera disahkan dan diberlakukan.

“Kalaupun dirasa masih ada hambatan, pemerintah bisa saja menerbitkan saja Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). Saya sepakat dan setuju hal itu, untuk mempercepat penanganan situasi ini,” tambahnya.

Dengan langkah itu, ia berharap supaya jangan nanti ada lagi seolah-olah pengkambinghitaman menyalahkan pemerintah dan DPR. “Saya juga dengar bahwa kasus terorisme ini terjadi karena salahnya DPR yang tidak mau



Foto: Eno/hr

Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang

secara serius menyelesaikan RUU Anti Terorisme, padahal sebenarnya tidak demikian,” katanya.

Untuk itu, dia mengajak segenap masyarakat mendapatkan informasi yang positif dan minta kesiapan BIN, BNPT dan Polri. Dalam menghadapi rentetan kasus teror ini, menurutnya jangan seperti pemadam kebakaran, setelah terjadi baru semua ribut. Fakta di Pansus RUU Anti Terorisme ada *deadlock* dimana terkait keterlibatan TNI, kata Junimart, pemerintah yang membawahi Polri, mestinya segera mengambil sikap dengan situasi ini. “Ambil sikap kepada BIN dan minta Polri. Kalau tidak mampu, baru bisa membentuk tim khusus,” katanya.

Menanggapi pencegahan teroris yang kurang maksimal, Junimart mengatakan pencegahan itu relatif. Soal kesiapan tidak hanya menyangkut BIN, tetapi juga rakyat harus siap dengan situasi ini. Kalau melihat ada suatu kejanggalan di lingkungannya, laporkan kepada aparat, jangan sampai bersikap apatis. “Kalau ada hal-hal yang membuat tidak nyaman di lingkungannya, segera dilaporkan,” ia menambahkan. ■ **mp/sf**

Viva Yoga: Stok Beras Surplus, Tak Perlu Impor

Petani di beberapa daerah mengalami panen raya, salah satunya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hasil dari panen petani rata-rata mengalami kenaikan sekitar 10 persen. Perinciannya dari 5,5 ton per hektar pada tahun lalu menjadi 6,1 ton per hektar pada tahun ini. Namun anehnya, pemerintah justru mengimpor beras.

Menanggapi kebijakan yang absurd ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mempertanyakan langkah pemerintah. Dia mengkritisi pemerintah yang kembali melakukan impor beras 500 ribu ton. Padahal, menurut Viva, selama ini Kementerian Pertanian menyampaikan stok beras surplus.

“Bahkan komoditas beras premium dan jagung diklaim telah diekspor. Jika beras surplus, mengapa pemerintah impor beras 500 ribu ton lagi?” kata Viva seolah bertanya, dalam keterangan persnya kepada Parleментарia, Jumat (18/5).

Kritikan tersebut didasari oleh importasi kedua sepanjang tahun ini,



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi

bertepatan masa panen di beberapa daerah masih berlangsung. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, pemerintah akan kembali membuka keran impor beras 500 ribu ton. Dengan begitu, total impor beras tahun ini mencapai satu juta ton. Impor beras pertama sebesar 500 ribu ton dilakukan pada Januari 2018.

Viva pun mempertanyakan alasan pemerintah mengimpor lagi 500 ribu ton beras. Menurutnya keputusan impor ini tak sinkron dengan pengakuan Kementan yang menyatakan beras surplus. Kejanggalan lain adalah cadangan beras pemerintah (CBP) minus 27 ribu ton. Padahal pemerintah mengklaim stok beras surplus.

Menurut politisi PAN itu, impor beras oleh pemerintah di tengah panen raya saat ini, mengakibatkan harga gabah petani terus mengalami penurunan. Untuk gabah kering giling (GKG), harganya kini Rp4.400 per kg. Padahal, saat awal panen, harga GKG masih Rp4.800 per kg. ■eko/sf

Data Kebutuhan Beras Antar Kementerian Tidak Sinkron

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyatakan bahwa dirinya mendukung kehadiran Budi Waseso (Buwas) di Bulog. Teguh berharap Buwas dapat memberikan angin segar dalam lingkup persoalan ketersediaan pangan di Indonesia.

“Di awal kepemimpinan Buwas di Bulog, ia sudah dapat melihat bahwa terkait persoalan data beras, ternyata antar kementerian saja tidak sinkron,” kata Teguh saat rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Deputi BUMN beserta jajarannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

“Kalau kita minta penjelasan dari Menteri Perdagangan kenapa mengimpor beras, selalu dikatakan bahwa ketersediaan beras di pasar ada masalah atau terjadi kelangkaan,”

tambahnya.

Tetapi di sisi lain Menteri Pertanian selalu mengatakan bahwa kita sudah surplus, bahkan sudah bisa mengekspor, ungkap Teguh. “Ini satu pengakuan penting yang disampaikan oleh Kabulog. Menurut saya hal ini menjadi penting bagi parlemen untuk menyelenggarakan rapat kerja gabungan antara Komisi VI dan Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog agar persoalan beras ini tidak berputar-putar saling lempar. Siapa sebenarnya biang keroknya,” imbuhnya.

Senada dengan Teguh, Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjuredja juga mendukung pernyataan Kepala Bulog (Kabulog) Budi Waseso yang menyatakan rasa tidak persetujuannya terhadap rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada beberapa waktu yang lalu.

“Memang benar kalau kita tidak perlu melakukan impor beras 500 ribu ton. Sebab untuk menjaga jumlah stok, Kabulog telah menyiapkan sebanyak 1,5 juta ton beras. Itu artinya stok sudah cukup baik. Jadi jangan selalu cari untung saja. Oleh karenanya hal ini harus dipertanyakan kepada Menteri Perdagangan,” ujar Lili.

Pada kesempatan yang sama, Buwas selaku Kabulog yang baru mengatakan bahwa sampai hari ini pihaknya tidak bisa berpedoman pada data yang ada untuk

Komisi VI DPR Pastikan Stabilitas Harga Beras

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto pastikan harga pangan ke masyarakat terjangkau, begitupun dengan harga dari produsen ke petani. Hal tersebut diungkapkannya di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN bidang Pangan, Kepala Bulog, dan PTPN di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

“Kami ingin memastikan stabilitas harga di bulan Ramadhan sekaligus menjelang Idul Fitri atau Ramadhan. Di sini saya menilai yang terpenting sekarang adalah menjaga harga beras ke konsumen bagus, begitu juga dengan harga dari petani ke produsen bagus. Sehingga petani juga bisa tumbuh dengan baik. Dengan kata lain kita tidak hanya ingin harga ke konsumen atau masyarakat murah tapi malah memberatkan petani, tidak demikian. Kami ingin harga ke masyarakat murah, dan petani pun mendapat harga yang bagus juga,” ujar Dito kepada wartawan di sela-sela rapat.

Ungkapan tersebut, lanjut Dito, menyusul informasi dari Kementerian Perdagangan yang akan kembali mengimpor 500 ribu ton beras. Walaupun pada kesempatan yang sama dijelaskan

Kepala Bulog Budi Waseso bahwa ketahanan pangan bangsa kita saat ini terbilang cukup. Bahkan Bulog juga sempat mengungkapkan akan memberikan cadangan.

“Tadi kami sudah mempertanyakan



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto (kiri) bersama Ketua Komisi VI Teguh Juwarno

Foto: Andri/hr



Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno bersama sejumlah Anggota DPR berdialog dengan Dirut Bulog

Foto: Andri/hr

dijadikan patokan, khususnya dalam masalah beras. Karena data dari Menteri Pertanian mengenai hasil produk beras juga belum valid.

“Kita juga melihat data dari bidang pertanian mengenai sawah ladang, ini juga tidak jelas. Kemudian dari Menteri

Perdagangan mengatakan bahwa suplai kurang karena harga naik. Padahal faktanya tidak demikian, karena kalau kita lihat data-data di lapangan seluruh sawah yang memproduksi padi ketika mereka panen raya itu luar biasa surplus,” papar Buwas.

Menurutnya, Bulog sendiri tidak

mampu menyerap seluruh gabah dari petani. Banyak regulasi yang menghambat Bulog untuk bisa menyerap secara maksimal. Buwas akan mengajukan perubahan-perubahan terhadap regulasi yang ada, agar Bulog bisa benar-benar berperan aktif dalam menangani masalah beras.

“Ada permasalahan yang baru kami temukan, dimana impor untuk cadangan pemerintah kebanyakan di gudang kita menunggu penugasan, sedangkan (beras) itu batas waktunya, sehingga akan turun nilai maupun kualitasnya. Ini akan berbahaya bilamana beras itu disimpan terlalu lama. Kita tidak mau ada istilah diperbaiki atau *mixing*, karena pada akhirnya yang akan rugi adalah masyarakat sebagai konsumen,” tandasnya.

Pada waktu sebelumnya ditemukan beras Bulog yang kondisinya berketu dan bau, sambungannya, karena memang sudah *expired*. Tetapi untuk mengurangi kerugian, maka akhirnya diturunkan. “Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi,” pungkasnya. ■ as/sc

Berantas Akar Masalah Terorisme

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu berpendapat kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab munculnya terorisme. Ketimpangan ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat menumbuhkan kecemburuan dan rasa tidak puas pada pemerintah. Menurutnya dengan memberantas kemiskinan bisa menjadi salah satu cara ampuh menghilangkan ideologi teror.

Terkait pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan atau Koopssusgab, bersama Polri untuk ikut memberantas aksi terorisme, ia menyatakan pembentukan Koopssusgab tak menjamin masalah terorisme diselesaikan. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah akar masalah terorisme yang harus diselesaikan.

“Saya kira kemudian akar masalahnya ini diperhatikan. Ini kan, kemiskinan semakin besar, ketimpangan semakin melebar, ada rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Apapun dilakukan melawan terorisme, tetapi akar masalah jangan lupa,” papar Gus Irawan dalam keterangan persnya, Jumat (18/5).

Anggota Dewan Dapil Sumatera Utara II ini beranggapan, apapun lembaga yang dibentuk untuk tujuan pemberantasan terorisme, bisa saja dilakukan. Namun, hendaknya penanganan terorisme ini



Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu

Foto: Kresno/hr

juga menekankan pada solusi yang lebih substansial. Baginya pemberantasan kemiskinan merupakan kebijakan yang bersifat untuk pencegahan secara rasional. “Saya kira harus masuk ke akar masalahnya,” tandas Gus Irawan.

Saya kira kemudian akar masalahnya ini diperhatikan. Ini kan, kemiskinan semakin besar, ketimpangan semakin melebar, ada rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

Berkenaan dengan itu, rentetan aksi terorisme di Surabaya, Sidoarjo, hingga Riau, memunculkan desakan agar revisi Undang-Undang Anti Terorisme segera dirampungkan. Pemerintah dan DPR diharapkan satu suara, agar revisi UU Anti Terorisme rampung.

Di tengah desakan revisi UU Anti Terorisme, muncul usulan agar dilibatkan Koopssusgab yang merupakan pasukan elite TNI dari tiga matra. Keterlibatan Koopssusgab ini, nanti akan bekerja sama dengan Polri dalam memberantas terorisme. ■ eko/sc

Keluarga Harus Antisipasi Anak Terlibat Aksi Terorisme

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, pelibatan anak dalam aksi terorisme diakibatkan karena kehidupan keluarga yang salah tafsir terhadap agama. Menurutnya, sulit untuk menjauhkan anak dari peran keluarga dan orang tua yang memberikan pemahaman agama yang dianggap salah.

Ace menegaskan, seharusnya perlindungan anak ada pada keluarga. Namun ternyata, diantara anak-anak yang terlibat aksi terorisme itu menolak belajar Pendidikan Moral Pancasila. Setiap kali masuk pelajaran, malah keluar. Menurutnya, ini bisa menjadi indikasi masih ada orang-orang yang anti pada dasar negara Pancasila.

“Pembinaan anak harusnya menjadi kewajiban keluarga, lalu di

sekolah dan ketiga di lingkungan masing-masing. Ini memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda bagi masing-masing, baik sekolah, keluarga dan lingkungan terkecil, RT atau RW. Ketiganya difasilitasi oleh pemerintah, supaya tercipta keluarga yang bisa memahami agama secara toleran, serta diberikan pendidikan sesuai prinsip Islam yang *rakhmatan lil-alamiin*,” kata Ace di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

Kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Ace melihat UU

Dalam kasus bom Surabaya, justru orang tua si anak yang merupakan tokoh organisasi terorisme, sehingga institusi apapun tidak bisa terlalu jauh masuk ranah keluarga. Menurutnya, aparat seperti Badan Intelijen Negara (BIN) atau Densus 88 bisa mendeteksi bibit radikal dan melacak aktivitas jaringan teroris

Kesenjangan Jadi Lahan Subur Terorisme

Kesenjangan, baik sosial, pendidikan, sampai keadilan hukum menjadi lahan subur terorisme di tanah air. Inilah yang perlu dibenahi untuk mencegah aksi terorisme meluas. Angka pengangguran yang terus membengkak juga menjadi salah satu potensi terorisme.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengemukakan hal ini sebelum Rapat Paripurna DPR, Jumat (18/5). “Terorisme muncul karena ada kesenjangan terutama dalam konteks penegakan keadilan, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan sosial. Dalam konteks kesenjangan sosial, banyak pengangguran di berbagai tempat. Sementara tenaga asing banyak masuk ke Indonesia. Masyarakat pun menilai tidak ada keadilan,” paparnya.

Dan ironisnya, banyak pencari kerja justru dari sekolah agama. Kalau ini tidak diantisipasi oleh pemerintah dan DPR, kata Ali, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan jangka panjang. Dan terorisme bukan saja persoalan di dalam negeri, tapi juga ada faktor global. Ketika faktor global berpengaruh, maka rekrutmen terhadap terorisme itu sangat mudah, terutama bagi orang-



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong

Foto: Rumi/hr

Dalam konteks kesenjangan sosial, banyak pengangguran di berbagai tempat. Sementara tenaga asing banyak masuk ke Indonesia. Masyarakat pun menilai tidak ada keadilan

orang frustrasi, karena mengalami kesenjangan itu.

“Agama harus muncul sebagai sumber nilai yang membangun pesan-pesan kerahmatan. Ketika dikotomi terjadi antara pesan agama dengan perilaku sosial yang tidak sepadan, maka menjadi sumbu kekacauan dan masalah,” jelas politisi PAN tersebut. Dijelaskannya, terorisme dalam pengertian klasik selalu berhadapan dengan kekuasaan. Namun, terorisme masa kini berubah dengan menyentuh kepentingan publik dan perorangan. ■ mh/sc



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

Foto: Arief/hr

ini tidak bisa menjangkau hal-hal yang sangat privat (keluarga). Bagaimana institusi sekolah atau pemerintah bisa menjangkau ranah keluarga. Untuk itu, pembinaannya harus banyak dilakukan di luar keluarga, misalnya sekolah.

“Kalau ditemukan pemahaman agama anak cenderung radikal, maka sekolah punya tanggung jawab untuk membinanya dan ditelusuri lebih lanjut,” jelas Pimpinan Komisi VIII dari Partai Golkar ini.

Namun Ace mengakui, dalam kasus bom Surabaya, justru orang tua si anak yang merupakan tokoh organisasi terorisme, sehingga institusi apapun tidak bisa terlalu jauh masuk ranah keluarga. Menurutnya, aparat seperti Badan Intelijen Negara (BIN) atau Densus 88 bisa mendeteksi bibit radikal dan melacak aktivitas jaringan teroris.

“Jaringan terorisme cukup mengakar, mudah sekali dideteksi. Kecenderungan orang intoleran mudah disusupi bibit radikalisme. Hal-hal seperti ini bisa

dideteksi dengan cara melihat perilaku, relasinya, serta menjadi anggota organisasi apa. Juga bisa dilihat dari cara berpakaian, kendati itu bukan satu-satunya,” pungkas Ace.

Ace juga menyangkan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kemenag yang terlibat dalam tindakan terorisme. Padahal seharusnya Kemenag menjadi pilar utama bagi tegaknya NKRI, tapi ternyata disusupi oleh paham-paham radikal. Di instansi pemerintah, perlu adanya kontrol terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan.

“Itu salah satu hal yang menjadikan pemerintah kecolongan. Harusnya pembinaan keagamaan dilakukan oleh unit kerja di Pemerintah. Dan sejak awal mestinya sudah bisa dideteksi setiap unit kerja yang ada,” ungkap politisi dapil Banten ini. ■ mp/sf

Komisi IX DPR Pertanyakan Ketersediaan Dokter Spesialis di Jateng

Komisi IX DPR mempertanyakan ketersediaan dokter spesialis di Jateng. Saat ini, keberadaan dokter spesialis dasar, seperti spesialis anak, spesialis obstri ginekologi, penyakit dalam, anestesi dan bedah, negara kita masih kekurangan sebesar 1921 dokter spesialis di bidang tersebut.

dan menyelesaikan muaranya bukan di hilirnya, karena memang program tersebut masih baru seperti bayi baru lahir dan harus dicari formula yang tepat terkait kekurangan dokter spesialis ini,” terangnya.

“Persoalan dokter spesialis itu tidak hanya terjadi di Provinsi Jateng, bahkan hampir terjadi di berbagai daerah apalagi di luar Jawa, karena itu kita beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada Kemenkes untuk menanggulangi persoalan tersebut,” ujar Anggota DPR dari Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (F-PCG) saat Rapat dengan Plt Gubernur Jateng Heru Sudjarmoko dan jajarannya, baru-baru ini.

Menurut Andi, kekurangan dokter spesialis kemudian dijawab oleh Kemenkes melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), dimana mereka harus mengabdikan kepada RS yang memiliki kerjasama namun, lanjutnya, para dokter kerap mengeluhkan tidak mendapatkan peralatan yang memadai. “Karena itu, kita harus bekerja lebih panjang lagi



Foto: Sugeng/hr

Tim Kunker Komisi IX DPR meninjau Laboratorium BPOM Semarang

Pendidikan Karakter Cegah Pengaruh Radikal di Institusi Pendidikan

Guna mencegah masuknya pengaruh paham radikal ke dalam institusi pendidikan, Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengatakan bahwa dirinya sudah mengusulkan agar dilaksanakan sebuah diskusi antara Komisi X DPR dengan Mendikbud serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengenai pengertian yang sesungguhnya tentang pendidikan karakter dan bentuknya akan seperti apa.

metodologinya. Lalu bagaimana pula mengkomodifikasinya ke dalam pendidikan formal,” paparnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi suatu langkah yang sangat penting, dimana akan dibahas persoalan mulai dari hulunya. “Kita sangat prihatin sekali

“Apakah hal ini sudah masuk didalam kurikulum atau belum. Karena hal itu harus dimulai dari kurikulum pendidikan, dan juga terkait dengan intensitas dan guru-gurunya. Seperti apa guru-guru yang akan mengajarkan tentang pendidikan karakter tersebut,” ucap

Mujib di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

Dari pertemuan tersebut, nantinya diharapkan akan menemukan sebuah hasil kesimpulan yang dapat diterapkan. “Kira-kira akan ketemunya dimana, apakah mereka yang akan membuatkan semacam kurikulum atau memberi catatan



Foto: Eka/hr

Anggota Komisi X Mujib Rohmat

Kepala Dinas Kesehatan dr Yulianto mengatakan angka kebutuhan dan ketersediaan dokter spesialis di Jawa Tengah masih belum berimbang, sehingga tidak dapat memenuhi rasio satu dokter spesial untuk 20.000 penduduk. Meski begitu, saat ini pihaknya sedikit terbantu dengan adanya Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), namun hanya dapat mengatasi sementara karena durasi program tersebut hanya satu tahun.

Dia mengusulkan Kementerian Riset Dikti agar lebih mendorong produksi dokter spesialis, karena permasalahan yang utama adalah lambatnya produksi dokter spesialis. Dengan semakin banyaknya dokter spesialis, diharapkan bisa menyesuaikan dengan kecepatan kebutuhan dan pertumbuhan pelayanan kesehatan yang semakin maju dan berkembang.

Terkait ketersediaan obat-obatan, Yulianto mengatakan ada kendala sistem pengadaan *e-catalog* di mana sering sekali obat-obat yang masuk dalam *e-catalog* ternyata tidak tersedia karena diproduksi sangat terbatas. Sehingga dia meminta ada komitmen bersama dalam memenuhi kebutuhan yang sudah disepakati di dalam pengadaan *e-catalog*. ■ si

terhadap model baru, dimana orang tua bisa mengajak anaknya untuk ikut terlibat dalam melakukan kasus teror bom. Ini suatu yang luar biasa dan hal itu harus ada pencegahannya,” tandas politisi Fraksi Golkar itu.

Harus dibedakan antara orang taat dengan orang radikal, sebab orang radikal berbeda dengan orang taat, sambungnya. Mujib juga setuju dengan adanya pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. “Hanya yang menjadi persoalan adalah nanti produknya dalam bentuk apa, kalau dahulu produknya adalah Tap MPR. Karena bentuknya Tap MPR maka eksekutif harus melaksanakannya, mengingat pada saat itu MPR adalah sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

Mujib menyampaikan, sekarang ini yang melaksanakan adalah hanya MPR dengan program Sosialisasi 4 Pilar nya. “Itu tidak cukup sama sekali, karena intensitasnya kurang, tidak masif, dan tidak terstruktur,” pungkasnya. ■ dep/sc

Pemerintah Diminta Jaga Kedaulatan Ekonomi

Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 pada minggu lalu, kini masing-masing fraksi menyampaikan tanggapannya atas pokok-pokok pikiran yang menjadi rujukan dalam pembangunan di tahun 2019.



Anggota Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto membacakan tanggapan Fraksi PDIP di Ruang Rapat Paripurna

Semua fraksi di DPR membacakan tanggapannya dengan memberikan catatan serta dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan 2019. Terhadap semua catatan yang disampaikan fraksi DPR, nantinya Menteri Keuangan akan menampung dan memberikan jawaban atas tanggapan yang disampaikan.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan tantangan pemerintah semakin besar sehingga pemerintah dituntut mampu menjaga kedaulatan NKRI dalam rangka menjalankan roda perekonomian, salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya alam dalam negeri.

“Kemandirian jadi hal penting untuk mencapai kedaulatan, semakin negara bergantung maka semakin lemah. Pemerintah diharapkan mampu jalankan strategi ekonomi yang mengoptimalkan sumber daya dalam negeri,” ujar Adisatrya di ruang rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Selanjutnya, Adisatrya juga meminta perusahaan BUMN dan swasta harus jadi motor penggerak ekonomi nasional guna meningkatkan peluang lapangan kerja.

Sementara itu, Anggota Fraksi

Gerindra Heri Gunawan menyatakan dalam pembangunan tahun 2019 diperlukan sebuah koreksi yang substansial agar menjadi lebih baik. “Diperlukan koreksi yang substansial terkait perbaikan struktur antar sektoral dalam strategi pembangunan jangka pendek. Kami meyakini kebijakan ekonomi seyogyanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkedaulatan,” tutur Heri Gunawan.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat Verna Gladies Merry Inkiriwang mengingatkan bahwa proses pembangunan sebuah negara adalah saling berkelanjutan. Sehingga pembangunan adalah sebuah rangkaian dan tonggak sejarah yang harus dipahami oleh pemimpinnya. Terkait roadmap pembangunan 2019, Partai Demokrat meminta agar hak bekerja oleh masyarakat dapat tercapai agar masyarakat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

“Kiranya pemerintah perlu memahami pembangunan adalah rangkaian tonggak sejarah dari masa ke masa. Pembangunan adalah berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan hak pekerja dan hak untuk bekerja agar masyarakat bisa jadi tuan di negerinya sendiri,” ujar Verna. ■ hs/sc

Gubernur BI Baru Harus Lebih Baik

Anggota Komisi XI Misbakhun meminta agar Gubernur Bank Indonesia (BI) yang menggantikan Agus Martowardojo mampu bekerja lebih baik dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Diketahui, Agus Martowardojo akan memasuki pensiun pada Rabu (23/5) telah mewariskan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) sebesar Rp14.200. Sehingga ini menjadi tantangan berat bagi Gubernur BI yang baru.



Anggota Komisi XI DPR Misbakhun

Misbakhun memberikan catatan perjalanan nilai tukar rupiah selama lima tahun terakhir, karena pada saat Agus Martowardojo dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia pada Mei 2013, nilai tukar rupiah terhadap USD Rp9.700. Namun lima tahun kemudian, kata dia, pada saat Agus Martowardojo akan memasuki pensiun nilai tukar rupiah terhadap USD sudah mencapai Rp14.200.

“Selama lima tahun Pak Agus Marto memimpin Bank Indonesia sejak Mei 2013, memiliki catatan tersendiri bagi perjalanan nilai tukar rupiah. Ini akan menjadi catatan

sejarah. Angka ini akan dicatat oleh bangsa dan negara,” ujar Misbakhun saat RDP dengan Gubernur BI Agus Martowardojo, Selasa, (22/5) petang.

Politisi Golkar ini menjelaskan harus ada solusi yang ditawarkan dari Gubernur BI yang baru agar nilai tukar rupiah yang merosot ini tidak meresahkan masyarakat. “Harus ada solusi konkret untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Angka Rp14.200 ini akan menjadi catatan baru bagi bangsa Indonesia. Apakah Pemerintah akan melakukan redominasi atau akan menurunkannya melalui mekanisme yang ada?,” tanya Misbakhun.

Karena itu dirinya menanti terobosan yang akan dilakukan Gubernur BI yang baru yakni Perry Warjiyo dalam menghadapi situasi menurunnya nilai tukar rupiah ini. “Gubernur Bank Indonesia mendatang harus memiliki strategi jangka panjang untuk membangun bank sentral yang baik,” tutup Misbakhun.

■ hs/sc

Daya Beli Lemah Warnai Triwulan I 2018

Perekonomian nasional pada triwulan I tahun 2018 ini masih diwarnai merosotnya daya beli masyarakat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 persen. Sedangkan pada triwulan I 2018 turun menjadi 5,06 persen.

Fakta ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat diwawancara Parlemen lewat sambungan telepon, Selasa (22/5). “Salah satu indikator pelemahan tersebut dapat dilihat dari penurunan sektor ritel sebesar 5 persen. Itu berarti ada distorsi pada konsumsi rumah tangga. Distorsi konsumsi rumah tangga menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung akan turun. Sebab, lebih dari 50 persen sumber pertumbuhan ekonomi dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga,” jelasnya.

Dikatakan Heri, RPJMN 2015–2019 tentang pembangunan berkelanjutan seperti membangun ekonomi sampai triwulan I 2018 ternyata

belum tercapai. Daya beli rakyat seolah diberangus ketika pemerintahan sekarang baru berkuasa sepuluh hari. Pertumbuhan konsumsi masyarakat berjalan sangat lamban.

Pada sisi inflasi, juga memperlihatkan angka 1,09 persen. Angka itu, menurut Heri, memang kecil, tapi kecilnya angka inflasi itu disebabkan oleh penurunan permintaan masyarakat. “Untuk diketahui, kenaikan tarif dasar listrik non-subsidi,



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

Foto: andri/hr

Pengibaran Bendera Israel di Papua Nodai Perjuangan Diplomatik Indonesia

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi' Munawar meminta pihak keamanan dan pemerintah tegas dalam menindak pelaku aksi pawai komunitas Sion Kids of Papua yang mengibarkan bendera Israel di Jayapura, Papua, baru-baru ini. Menurutnya, pengibaran bendera Israel telah menodai perjuangan diplomatik Indonesia.



Foto: Ojji/hr

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi' Munawar

“Jika diperhatikan apa yang mereka lakukan sejatinya bukan sebuah peristiwa budaya dan agama, namun justru bentuk pengakuan eksistensi dan pengkultusan bendera Israel dari bangsa Yahudi. Ironisnya, dalam kegiatan tersebut tidak ada satupun bendera Indonesia, bukti bahwa mereka melanggar konstitusi,” demikian disampaikan Rofi' dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (21/05).

Rofi' menjelaskan, Indonesia memiliki tata aturan dalam penggunaan

bendera asing yang secara nyata telah dilanggar Komunitas Sion Kids. Sisi lain, Pemerintah Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Menurutnya, selama ini Indonesia dalam berbagai kebijakan negara dan sikap resmi senantiasa berkomitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari misi diplomatik nasional.

Politisi F-PKS ini menambahkan, penggunaan bendera asing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41

BBM (Pertalite dan Pertamina) termasuk gas, telah menyebabkan penurunan permintaan masyarakat. Itu terkonfirmasi oleh penjualan ritel yang minus,” ungkap Heri.

Ada kebijakan ekonomi yang keliru dengan inflasi yang relatif terkendali namun pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Idealnya, harus dilakukan kebijakan fiskal ekspansif. Tidak boleh ada surplus keseimbangan primer, dimana pada bulan April 2018 terjadi surplus Rp24,2 triliun, karena belanja negara masih relatif kecil.

Sementara pada triwulan II 2018, realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah ada di angka Rp527,82 triliun

Ada kebijakan ekonomi yang keliru dengan inflasi yang relatif terkendali namun pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Idealnya, harus dilakukan kebijakan fiskal ekspansif. Tidak boleh ada surplus keseimbangan primer

atau terealisasi sebesar 27,86 persen dari target APBN 2018. “Saya melihat bahwa sumber penerimaan itu masih sangat tergantung pada penerimaan perpajakan. Per April 2018, penerimaan perpajakan sebesar Rp383,27 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp33,66 triliun atau masing-masing baru terealisasi sebesar 26,91 persen dan 17,34 persen dari target APBN 2018,” paparnya.

Ditambahkan mantan Wakil Ketua Komisi VI ini, pada sektor pengeluaran pemerintah, polanya tidak maksimal di awal. Akhirnya, di triwulan berikutnya langsung kejar tayang. Dengan pola begitu, pengeluaran pemerintah di triwulan I 2018 tidak berperan besar. Implikasinya, sambung Heri, melambatnya pertumbuhan di triwulan I 2018. Pada tahun ini diperparah pula dengan penurunan laju konsumsi rumah tangga.

“Sementara itu, kita juga tak bisa berharap banyak pada peran ekspor, karena adanya ketidakstabilan ekonomi global, nilai tukar rupiah yang terpuruk, dan perang dagang Cina-Amerika, yang berimplikasi pada serbuan barang-barang impor yang akan lebih murah masuk ke pasar domestik. Bahkan, impor semakin tinggi terutama untuk barang konsumsi,” imbuh Heri. ■ mh/sc

Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing. Bunyi Pasal 3 ayat (1) Apabila bendera kebangsaan asing digunakan, maka bendera itu harus digunakan bersama-sama dengan bendera kebangsaan Indonesia.

“Selain itu, di pasal 6 disebutkan Kepala Daerah dapat melarang penggunaan bendera kebangsaan asing, apabila menurut pertimbangannya penggunaan itu dapat menyebabkan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan umum,” tegas Rofi.

Rofi' menilai kegiatan Sion Kids jika dicermati ternyata sudah sering dilakukan dan bukan pertama kali. Selain menggunakan bendera Israel, komunitas itu juga lakukan kegiatan yang memanggakan bangsa Israel.

“Sudah sepatutnya pemerintah daerah dan pihak keamanan tegas menindak. Terlebih kegiatan tersebut menurut keterangan polisi diikuti ada tokoh-tokoh dari DPRD Papua dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Harusnya mereka paham dengan aturan,” tandas Rofi.

Sebagaimana diketahui, pawai pengibaran bendera Israel dengan mobil dan jalan kaki itu berlangsung di Jayapura, Papua, pada Senin 14 Mei 2018. Setidaknya ada dua video yang beredar terkait aksi pengibaran bendera Israel yang diduga dilakukan dalam acara Kebaktian Budaya Bangsa ke-12 di Gedung Olahraga (GOR) Waringin Kotaraja, Jayapura. ■ ann/sf

Inisiasi Forum Parlemen Dunia, DPR Dorong Isu Energi Terbarukan

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kembali menggagas Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) untuk kedua kalinya pada 12 - 13 September 2018 mendatang. Sidang tersebut akan mengusung tema 'Kemitraan menuju Energi Berkelanjutan bagi Semua'.

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, energi kerap kali menjadi isu sensitif bagi stabilitas dan keamanan global. Menurutnya, kebutuhan akan energi mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia serta produktivitas masyarakat untuk mendukung upaya global pemberantasan kemiskinan dan pembangunan. Namun, sangat disayangkan sumber-sumber energi konvensional masih menjadi kontributor utama terjadinya pemanasan global.

Hal itu ia ungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) persiapan penyelenggaraan The Second Parliamentary Forum on Sustainable Development bersama Deputy Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas Arifin Rudianto, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Muhsin Syihab, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan ESDM Harris, serta anggota BKSAP lainnya.

"Karena itu, DPR kembali menginisiasi Forum Parlemen Dunia dengan tema

energi terbarukan, saat ini dunia darurat memerlukan energi baru terbarukan (EBT) guna menjamin efisiensi dan sejalan dengan pertumbuhan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan," ungkap Nurhayati.

Politisi Partai Demokrat ini memaparkan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus ditempatkan sebagai tujuan bersama. Parlemen sebagai institusi krusial memiliki peranan penting menentukan arah kebijakan pemerintah terkait perundangan, anggaran, pengawasan dan diplomasi luar negeri. Sisi lain, Parlemen juga secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

"Karena itu, kemitraan global sangat penting bagi parlemen guna mensejahterakan masyarakat dunia serta menjaga kesinambungan bumi. Bagaimana ada kebijakan *parlemen to parlemen* terhadap kepentingan rakyat," jelasnya.

Ia menambahkan, dengan kebijakan yang baik, pendanaan dan investasi yang



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf

Foto: Jaika/hr

memadai, energi terbarukan dan bersih akan lebih terjangkau dan mudah diakses. Mengingat, di Indonesia sendiri, masih ada 2500 desa yang belum teraliri listrik.

"Di sinilah peran parlemen menjadi signifikan melalui pengawasan yang efektif atas kebijakan-kebijakan terkait energi dan pembentukan payung hukum yang mendukung pengembangan energi ramah lingkungan," imbuhnya. ■ ann/sf

Sambut Bonus Demografi, ASN Harus Mampu Jadi Supporting System Anggota Dewan

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dalam Pidato Upacara Hari Kebangkitan Nasional yang digelar di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR/ DPR/ DPD RI, mengungkapkan perlunya kesiapan diri para Aparatur Sipil Negara (ASN) di era digital, dan Indonesia yang akan menyambut bonus demografi pada tahun 2028.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti mengatakan, bahwa dengan adanya bonus demografi Indonesia pada tahun 2028, penduduk Indonesia lebih banyak yang produktif, dengan *background* yang lebih baik. Selain itu, saat ini telah diterimanya ASN yang lebih selektif dan terbuka.

"Pada saat ini juga sudah dimulai dengan diterimanya ASN yang lebih selektif, dengan penerimaan yang lebih terbuka dan benar-benar tidak seperti dulu," ungkapnya usai Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di halaman Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5). Peringatan kali ini mengusung tema: 'Pembangunan Sumber

Sekjen DPR Yang Baru Akan Tingkatkan Pelayanan Kesetjenan DPR

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan akan terus meningkatkan kinerja Kesetjenan DPR sebagai *supporting System* bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI. Hal tersebut disampaikan sesaat setelah dilantik sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

“Ada tiga hal yang akan kita kejar ke depan, yaitu birokratisasi, digitalisasi dan pengembangan SDM. Itu tiga kunci yang akan kita kejar terus supaya pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPR berjalan dengan baik,” ungkap Indra di Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

“Sesungguhnya kita inikan memberikan pelayanan bukan hanya kepada internal namun juga kepada eksternal. Ke depan bagaimana kita mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan akan kita pikirkan agar dapat tercipta pelayanan yang baik pula,” ungkapnya.

Indra juga menyampaikan bahwa, bersama Kesetjenan DPR akan

mengevaluasi segala sistem yang sudah berjalan, mana yang kurang maksimal akan diperbaikinya. Terutama sistem birokrasi yang panjang akan dipercepat sehingga birokrasi bisa berjalan dengan maksimal.

“Jika birokrasi yang berjalan secara panjang dan itu bisa dipersingkat, maka kita akan melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujar Indra.



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar

“Ke depan cara-cara konvensional akan kita tinggalkan, dan ke depan kita akan mengejar bagaimana menginformasikan informasi tugas dan fungsi DPR dengan baik dan cepat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dengan jelas,” ujarnya.

Dia mencontohkan, ke depan akan lebih mengembangkan media sosial terutama dalam menginformasikan kinerja dewan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih cepat mendapatkan informasi terkait kinerja dewan.

Indra yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah Sekretariat Negara menyampaikan bahwa, walaupun berada di lembaga politik, dia akan mengedepankan asas netralitas, akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, serta persatuan dan kesatuan.

Sebelumnya saat melantik Indra Iskandar, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berpesan agar Indra Iskandar segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja DPR RI serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran sekretariat jenderal dan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk bisa membangun tim yang solid dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah baik selama ini. ■ skr/sc

Daya Manusia Memperkuat Fondasi Kebangkitan Nasional Indonesia di Era Digital’.

Maya, panggilan akrab Damayanti melanjutkan, dengan akan dihadapinya bonus demografi tersebut, dirinya berharap para calon ASN yang akan diterima di kementerian dan lembaga manapun, untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dirinya,

Pada saat ini juga sudah dimulai dengan diterimanya ASN yang lebih selektif, dengan penerimaan yang lebih terbuka dan benar-benar tidak seperti dulu

utamanya pada *background* pendidikan dan integritasnya kepada masyarakat.

Sementara itu, mengingat *stakeholder* utama dari ASN di lingkungan DPR RI adalah Anggota DPR RI, dirinya berharap ASN DPR RI bisa menjadi pendukung dan *supporting system* dari seluruh Anggota DPR RI. “Sehingga Anggota DPR RI bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan harapan dari masyarakat,” papar Maya.

Maya menambahkan, digitalisasi merupakan hal yang harus dan sudah wajib dimiliki kemampuannya oleh setiap ASN. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kemampuan dan pembangunan sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat di era digitalisasi saat ini. ■ tn.ndy/sf



Ptt. Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti



Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi'i (kanan)

Pansus Bangun Konstruksi Hukum Baru pada UU Terorisme

Saat ini Pansus DPR RI yang merumuskan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) sedang membangun konstruksi hukum yang baru. Selain ada konten pencegahan juga ada tim pengawas, pemulihan korban, dan keterlibatan TNI.

Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i mengemukakan hal ini di sela-sela Rapat Tim Perumus RUU Antiterorisme di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5). Pada UU No.15/2003 kontennya hanya memuat penindakan. Dan ini sudah tak cukup lagi menampung kebutuhan hukum terkini. "Padahal, kita tahu penindakan ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Selalu ada reproduksi teroris-teroris baru. Maka kita bangun konstruksi yang baru," katanya.

Pencegahan adalah isu penting dalam RUU Antiterorisme tersebut.

Pencegahan yang dimaksud bisa berupa kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Dengan aksi pencegahan, mereka yang terpapar atau terhasut para teroris, bisa mengurungkan niatnya melakukan teror di tengah masyarakat.

Sementara soal pelibatan TNI, Romo, begitu M. Syafi'i akrab disapa, RUU yang sedang dibahas ini telah membuka pintu. Sementara teknis pelibatannya diatur dalam Peraturan Presiden. TNI juga penting dilibatkan, karena skala gerakan terorisme terus meningkat. Konstruksi lainnya dalam RUU ini

adalah dibentuknya tim pengawas. Pengalaman lalu, sering kali terjadi *abuse of power* dalam penanganan terorisme.

Tim pengawas inilah yang kelak akan memantau sejauhmana konsistensi aparat di lapangan dalam memerangi terorisme. Penegakan HAM tetap harus dikedepankan. Yang juga tak kalah pentingnya adalah pemulihan korban terorisme. Pada UU No.15/2003 korban terorisme hanya mendapat kompensasi dan restitusi.

"Sebelumnya, korban-korban teroris yang tidak berdosa itu hanya mendapat kompensasi dan restitusi. Di UU yang baru ini kita buat lebih detail. Selain pemulihan medis, ada pemulihan psikososial, pemulihan psikologi. Kompensasi dan restitusi tetap tidak dihilangkan. Semua korban teroris adalah tanggung jawab negara," jelas Romo. ■ mh/sc



Ketua DPR Bambang Soesatyo menjadi narasumber Diskusi Perjalanan Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Kedepan sekaligus peluncuran buku 14 Tahun KPK di Gedung KPK, Rabu (23/5). Foto: Jaka/hr



Rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT. Pos Indonesia tentang kinerja dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (23/5). Foto: Andri/hr



Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan penyematan penghargaan satya lencana kepada 78 ASN di lingkungan Setjen MPR/ DPR/ DPD RI oleh Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti, Senin (21/5)

Foto: Odjie-arief/hr



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



**Mau motor
Zaman now?**

**IKUTI LOMBA
KRITIK TERBAIK DPR**

**KIRIM MEME & ESSAY
MEME (gambar, karikatur, video)
ESSAY maksimal 500 kata**

**MASA PENGIRIMAN KARYA:
19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018
PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018**

**PEMENANG UTAMA: Motor Zaman Now
Juara I Rp 10 juta, Juara II, Rp 7 juta,
Juara III Rp 5 juta**

KIRIM KE: SAAT PENGUMUMAN
DILANGSUNGKAN LOMBA STAND UP COMEDY



lombakritikterbaikDPR@gmail.com



lombakritikterbaikDPR@yahoo.com



[@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)



[@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)



[@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)